

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Tribun News Jateng

Wilayah: Kabupaten Kudus

Bebaskan Retribusi Tiga Bulan, Pendapatan Dinas Perdagangan Kudus Turun Rp 6 Miliar

<https://jateng.tribunnews.com/2020/04/30/bebaskan-retribusi-tiga-bulan-pendapatan-dinas-perdagangan-kudus-turun-rp-6-miliar>

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pendapatan Kabupaten Kudus dari sektor retribusi pasar turun hingga Rp 6 miliar.

Penyusutan itu menyusul kebijakan Pemkab Kudus membebaskan penarikan retribusi bagi pedagang di pasar tradisional mulai April 2020 ini.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Sudiharti menjelaskan, penarikan retribusi biasa dilakukan pada akhir bulan.

Namun mulai April hingga Juni instansinya melakukan pembebasan pembayaran retribusi selama tiga bulan.

"Biasanya retribusi ini ditarik setiap akhir bulan tapi mulai bulan ini sudah tidak ditarik," jelasnya di sela-sela peninjauan di Pasar Kliwon Kudus, Kamis (30/4/2020).

Kendati demikian, pedagang tetap harus membayar Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) yang dihitung berdasarkan luas kios.

Berbeda dari retribusi pasar yang ditagih setiap bulan, PKD dibayarkan satu kali dalam setahun.

"PKD tetap bayar tetapi bayarnya setahun sekali," ujar dia.

Pembebasan retribusi selama tiga bulan itu dapat diperpanjang sesuai situasional.

Pemberlakuannya juga tidak memerlukan peraturan bupati (Perbup).

Pasalnya, pembebasan retribusi dilakukan dalam kondisi darurat untuk membantu para pedagang.

"Karena kondisi darurat jadi tidak perlu Perbup, hanya persetujuan dari Bupati Kudus dan anggota dewan," ujar dia.

Pihaknya akan melakukan revisi dalam APBD perubahan 2020 ini yang semula pendapatannya Rp 15 miliar turun menjadi Rp 9 miliar.

"Penurunannya sampai Rp 6 miliar, nanti kami revisi target pendapatan kami di sektor retribusi pasar ini," ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono menerangkan pandemi Covid-19 mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).

Asumsinya jika pandemi masih ada hingga Juni 2020 akan menurunkan pendapatan hingga Rp 35 miliar.

"Itu asumsi jika dihitung sampai bulan Juni 2020, kalau ternyata sampai lebih dari bulan itu diprediksi akan bertambah penurunannya," ujarnya.

Adapun jumlah pendapatan yang paling besar berada pada sektor pajak hotel dan restoran yang saat ini dalam kondisi terpuruk.

"Paling besar itu dampaknya ke pajak, dari target PAD sebesar Rp 138 miliar," ujar dia. (raf)

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH